

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT FIQH SIYASAH  
(STUDI PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG)**

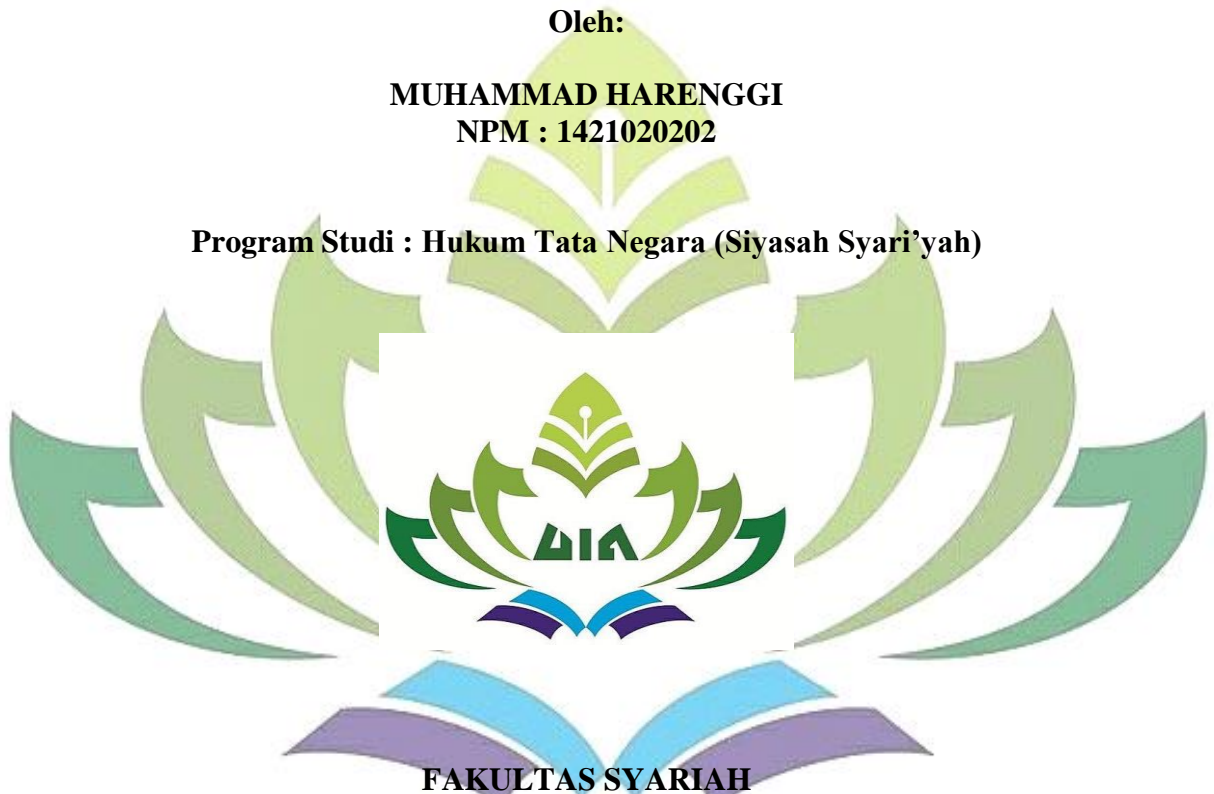
**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**MUHAMMAD HARENGGI  
NPM : 1421020202**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 02 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT FIQH  
SIYASAH  
(STUDI PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG)**

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh**

**Muhammad Harenggi**

**Npm : 1421020202**

**Program Studi : Siyasah**

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H/ 2019 M**

## ABSTRAK

Maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang semerawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Fenomena pedagang kaki lima (PKL) telah banyak perhatian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi. Pemerintah kota yang mengatur dalam penataan pedagang kaki lima (PKL), maka ini adalah masalah pemerintah kota Bandar Lampung dalam penataan pedagang kaki lima (PKL).

Dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat kota Bandar Lampung adalah masyarakat religius secara normatif masyarakat yang religius itu taat pada ajaran agama yang mengedepankan kebersihan, ketertiban, ketaatan, dan aturan-aturan yang telah digerakkan pemerintah dan tidak bertentangan dengan agama. Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat islam. Hal ini berdasarakan isi hadist “Ubadah bin Shamit yang di riwayatkan oleh Imam Al Bukhary dan Imam Muslim”

Permasalahan yang diteliti dalam pembahasan ini yaitu bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima berdasarkan perda No. 02 Tahun 2012 tentang PKL dan bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima berdasarkan perda No. 02 Tahun 2012 menurut Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan PKL Pasar tugu berdasarkan perda No. 02 Tahun 2012 dan untuk mengetahui pengelolaan PKL berdasarkan perda No. 02 Tahun 2012 menurut Fiqh Siyasah.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research*. Sifat penelitian bersifat *Deskriptif analistis*. Data di ambil dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Dari penelitian ini telah disimpulkan bahwa dalam Perda No.02 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa PKL memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang ahrus ditepati, hanya saja dalam lapangannya masih banyak PKL bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam undang-undang dengan baik, sehingga pasar Tugu masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau juga dri Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam undang-undang No.02 Tahun 2012, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

***Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421***

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 02  
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA MEURUT FIQH SIYASAH (STUDI PASAR  
TUGU BANDAR LAMPUNG)**

**Nama Mahasiswa : Muhammad Harenggi**

**NPM : 1421020202**

**Jurusan : Siyasah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasakan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khairuddin, M.H  
NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H  
NIP. 19751230200312002**

**Mengetahui  
Ketua Prodi Siyasah**

**Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 02  
TAHUN 2012 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT FIQH  
SIYASAH (STUDI PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG)** Oleh:  
**MUHAMMAD HARENGGI**, NPM: **1421020202**, Jurusan: **HUKUM TATA  
NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)**, telah diajukan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Senin, 26 Agustus 2019**:

**TIM PENGUJI**

**Ketua sidang** : Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

  
(.....)

**Sekretaris** : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy.

  
(.....)

**Penguji I** : H. Rohmat, S.Ag., M.HI.

  
(.....)

**Penguji II** : Dr. H. Khairuddin, M.H.

  
(.....)

**Dekan,  
Fakultas Syariah dan Hukum**

  
**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP: 196210221993031002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ (النساء : ٥٨)

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”<sup>1</sup>*

(Q.S. AN-Nisa (4) : 58)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), hlm. 100

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur penulis kepada Allah SWT, pemberi segalam rahmat bagi setiap makhluknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan hasil karya kecil nan sederhana ini kepada orang-orang yang aku cintai dengan harapan aku mencintai mereka seperti Allah mencintai mereka.

1. Ayahanda tercinta A. Hadin, S.pd. yang telah sangat berjasa dalam hidupku, mengajarku, membimbingku, mendorong dan menasehatiku, serta mendo'akan ku dalam segala hal, semoga kesuksesan ku menjadi hal terindah yang bisa ku persembahkan untuk mu.
2. Ibunda tersayang Dahlia, S.pd. yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, doa, dukungan dan kasih sayang yang luar biasa sehingga aku mampu sampai pada tahap ini.
3. Abang ku La. Arif Budiman, S.STP dan adik ku tersayang Apeliyasari yang selalu menjadi semangat ku untuk terus memperjuangkan cita-cita ku.
4. Wilda Zara Yunita, S.H yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan pengertian nya dalam menemaniku untuk mengejar cita-cita ku.
5. Keluarga Siyasah D 2014, yang telah mendukung, berbagi pengalaman dan ilmu selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Muhammad Harenggi dilahirkan di Tanjung Bintang 17 April 1996, anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak A. Hadin S.pd dan Ibu Dahlia, S.pd.

Pendidikan yang pernah penulis tempuh yang pertama yaitu Taman Kanak-kanak Al Azhar 10 dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 2 Serdang selama enam tahun yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 1 Bandar Lampung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Setelah tamat di pendidikan menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Bandar Lampung selama tiga tahun yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Siyasah Fakultas Syari'ah

Bandar Lampung, 26 juli 2019

Muhammad Harenggi

NPM: 1421020202



## KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang indah selain rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karuni-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H dan Eko Hidayat, S.sos., M.H masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.

5. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi dan lain-lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan data yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi penulisan ini.

Akhirnya, diharapkan karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 26 Juli 2019

Penulis,

Muhammad Harenggi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7

### BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Fiqh Siyasah .....	13
B. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kaki Lima.....	37
C. Pedagang Kaki Lima .....	46
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	46
2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima .....	50
3. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	54
4. Dampak keberadaan PKL.....	55
5. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima .....	59

### BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
1. Sejarah Singkat Pasar Tugu.....	62
2. Letak dan Kondisi Pasar Tugu .....	63

3. Data Unit Pasar Tugu .....	65
B. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tugu Bandar Lampung .....	66

## **BAB VI ANALISIS DATA**

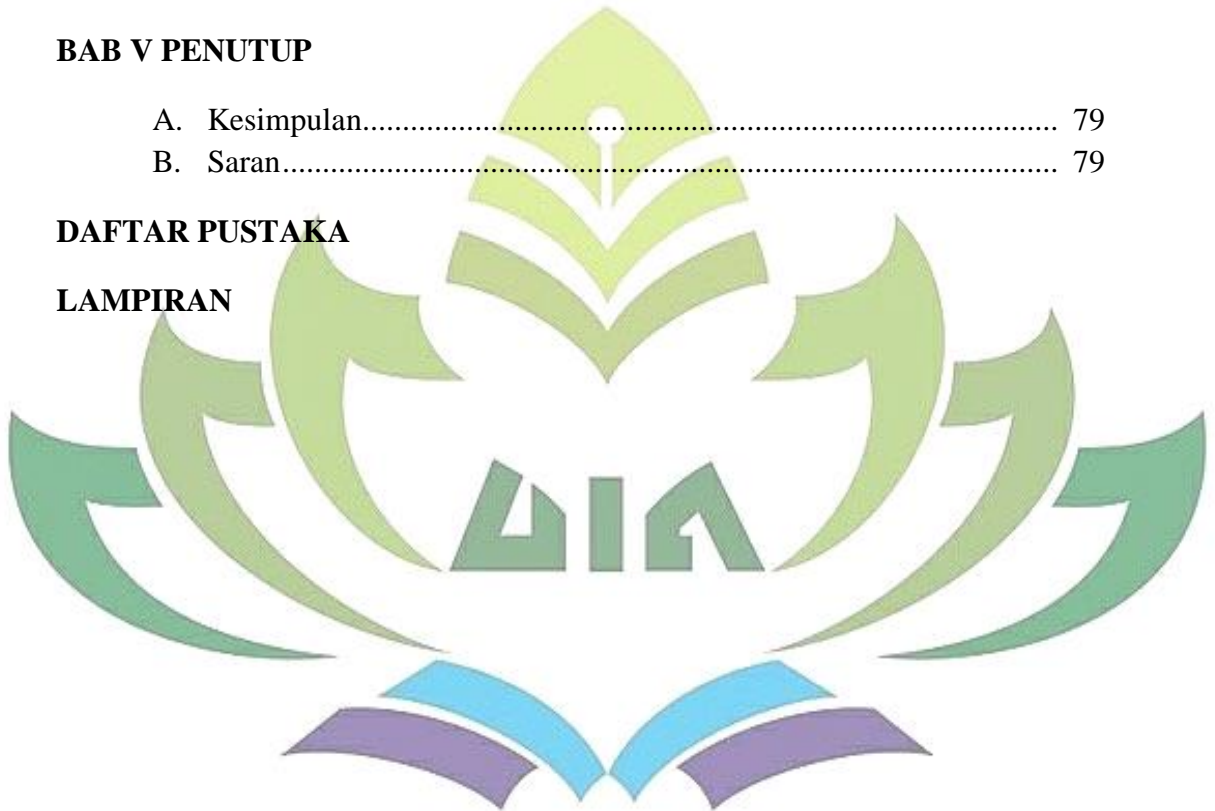
A. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung Berdasarkan Perda No.02 Tahun 2012 Tentang PKL.....	75
B. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012 Menurut Fiqh Siyasah .....	76

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini. Penjelasan judul skripsi ini penting dikarenakan agar pembaca dapat memahami makna dari istilah-istilah yang terkandung di dalam skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah:

**Pelaksanaan peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyash (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung).** Adapun pengertiannya antara lain:

**Pelaksanaan**, proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)<sup>2</sup>

**Peraturan daerah**, peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali Kota)<sup>3</sup>

**No 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima**, yaitu salah satu bentuk kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung sebagai upaya menangani penertiban PKL di Bandar Lampung<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), hlm. 774

<sup>3</sup> KBBI online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggal 4 September 2019

<sup>4</sup> Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012

**Fiqh Siyasah**, adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kajian secara ilmiah mengenai pelaksanaan Perda No.02 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima menurut Fiqh Siyasah, dengan objek kajian pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Menguraikan dampak pelaksanaan dari kebijakan peraturan daerah No 2 Tahun 2012 terhadap pedagang kaki lima di daerah Pasar Tugu Bandar Lampung, kondisi Pasar Tugu Bandar Lampung yang sangat tidak beraturan, tidak tertib yang tidak sesuai dengan peraturan daerah No. 02 tahun 2012.

Memahami dan memperluas wawasan terkait tentang peraturan daerah mengenai pengelolaan pedagang kaki lima di Bandar Lampung.

### **2. Alasan Subjektif**

Permasalahan ini masih belum ada yang membahasnya khususnya di Fakultas Syari'ah UIN RADEN INTAN LAMPUNG, selain itu juga sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu

dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah.

### **C. Latar Belakang**

Keberadaan PKL menimbulkan masalah sosial di antaranya dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh PKL pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi PKL, terutama dalam program penataan kota. Hal ini dapat terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan PKL.

Kota Bandar lampung yang terus mengalami kemajuan dalam hal pembangunan, namun juga memiliki berbagai masalah sosial yang kompleks. Salah satu masalah tersebut adalah penataan PKL. Pemerintah Kota Bandar lampung telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani gangguan dari kegiatan ekonomi informal PKL tersebut, mulai dari model pengusuran yang selama ini banyak dialami PKL sampai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang menjaga ketertiban dan keteraturan kepada PKL.

Keberadaan PKL yang dinilai cukup mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota, salah satunya di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung Kegiatan PKL di Pasar Tugu ini sering kali tidak mengindahkan aturan yang ada, misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalan

dan tidak memperhatikan kebersihan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan ketertiban. Namun di sisi lain PKL juga memiliki hak untuk bertahan hidup, PKL memiliki hak untuk mensejahterakan keluarga.

Salah satu kebijakan Pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam menangani masalah PKL, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di lokasi yang diterapkan oleh walikota Lokasi PKL yang ditetapkan oleh Walikota Lokasi PKL yang ditetapkan oleh Walikota tersebut meliputi:

1. Kawasan yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah dengan pedoman pada Rencana Tata Ruang/Wilayah
2. Kawasan pasar modern
3. Kawasan pasar tradisional
4. Lokasi yang ditentukan atau diizinkan pemerintah daerah pada jam-jam tertentu
5. Kawasan pada event atau kegiatan keramaian yang sifatnya insidental

Banyaknya PKL yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah daerah seperti pada Pasal 10 yang mengatur pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya, menyediakan tempat sampah dan lain sebagainya. Hal ini menjadi contoh nyata dalam kesenjangan peraturan pemerintah daerah



dengan kondisi yang ada di lapangan. Khususnya di daerah Pasar Tugu Bandar Lampung.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Objek kajian Fiqh Siyasyah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
5. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
6. Pelaksanaan demokrasi politik;
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>5</sup>

Masalahnya sekarang adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan itu diterapkan? Apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan itu telah dilaksanakan dengan baik? Adakah kendala di lapangan? Semuanya itu memerlukan kajian tersendiri. Untuk itulah dalam

---

<sup>5</sup> Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasyah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), hlm 36

kesempatan ini penulis mengangkat topik tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Kota Bandar Lampung)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung berdasarkan Perda No.02 Tahun 2012 Tentang PKL?
2. Bagaimana Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda No.02 tahun 2012 Menurut Fiqh Siyasah ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian:
  - a. Untuk mengetahui bagaiman pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012 Tentang PKL ?
  - b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda No. 02 tahun 2012 Menurut Fiqh Siyasah ?
2. Tujuan kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Kegunaan secara teoritis untuk mengetahui sejauh manakah dampak dari pelaksanaan kebijakan Perda No 02 Tahun 2012 khususnya di Pasar Tugu Bandar lampung
  - b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di fakultas Syari'ah.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>6</sup> Adapun lokasi penelitian ini adalah Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku hukum dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis* yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu secara sistematis dan objektif.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan secara tepat

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cetakan ketujuh, CV Mandar Maju, 1996), hlm. 81.

<sup>7</sup> Susiadi, *Metodologi penelitian*, (Bandar Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung 2015), hlm 110

dan jelas bagaimana bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 di Pasar Tugu Bandar Lampung.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder .

- a. Data primer , yaitu data peneltian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan.<sup>8</sup> Data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Pasar di Pasar Tugu, Pedagang, dan masyarakat sekitar Pasar Tugu Kota Bandar Lampung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian ini serta data yang ada pada Dinas Pasar di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung.

## 3. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau di teliti.<sup>9</sup> Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan di teliti. Adapun yang akan menjadi populasi dari

---

<sup>8</sup> Zeni Yusarlis, *Tujuan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak*, IAIN RIL, Bandar Lampung, 2015, hlm, 6

<sup>9</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 147



penelitian ini yaitu Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung, pengelola Pasar Tugu Bandar Lampung yang berjumlah 290.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian besarnya populasi saja, yang biasa disebut dengan sample.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *sampling* dimana dari Pasar Tugu yang menjadi sampel adalah 29 orang berdasarkan 10% dari populasi yang terdiri dari, 4 Aparatur Pengelola UPT Pasar Tugu, 1 Satpol PP, dan 24 pedagang kaki lima

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah tinjauan langsung ke lokasi penelitian sebelum diadakannya penelitian atau pencarian data di lapangan. Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 155

- b. Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monografi, catatan serta buku-buku yang ada.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang termasuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan<sup>11</sup>
- b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori<sup>12</sup> atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>12</sup> *Ibid*

- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. sistematis Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah<sup>13</sup>

Setelah data terkumpul, di koreksi, di evaluasi dan di olah yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan dengan permasalahan data dan rumusan masalah. Kemudian di susun ulang secara teratur sehingga menjadi sebah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

#### 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian di maksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini di gunakan untuk mengolah data yang telah di temukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang di teliti

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung PT. Citra Aditya Bhakti 2004), hlm 45

yang diperoleh. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara distematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.





## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqih* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>14</sup> Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), hlm 13

yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.

Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum Islam partikular dan praktis yang di-*istinbath* dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abdul Halim Uways, *fiqh* yang merujuk kepada dalil-dalil *qath'i* akan melahirkan fiqh statis, sedangkan jika merujuk kepada dalil-dalil yang *zhanni*, fiqh menjadi dinamis.

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi fiqh di bidang *furu'* (cabang-cabang/partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu'*. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>15</sup> Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’demi terciptanya kemashlahatan.<sup>16</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), hlm. 108

<sup>16</sup> Beni hlm 26

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm.

Dari pengertian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat;
2. Pengendalian negara;
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara;
5. Pengaturan hubungan antar negara;
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.<sup>18</sup>

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>19</sup> Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya;

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.* hlm 29

<sup>19</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.10



- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.<sup>20</sup>

Berdasarkan penegrtian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik keismpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasah. Pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak

---

<sup>20</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29

memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti *ara'ahl basher* atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al'urf* (uruf), *al'adah* (adap), *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah syar'iyah pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah wadh'iyah* sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap *siyasah wadh'iyah* pasti tidak Islami. *Siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;
- b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c. Tidak memberatkan masyarakat;
- d. Untuk menegakkan keadilan;
- e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;

f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Di samping berbeda sumber pembentukannya, *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.<sup>21</sup> Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut

---

<sup>21</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 1994) hlm. 2

menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita. Seperti ayat berikut ini:

٢٦ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢٧ (الإمراء ٢٦)

Artinya : “Katakanlah: Ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau muliakan barang siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa.”<sup>22</sup>

Selain ayat di atas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa Allah akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang memperbanyak amal sholeh di dunia.

٥٤ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥٥ (النور : ٥٥)

Artinya : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Dia sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 53

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 357

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Di tengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti ayat Al-Qur'an berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥ (المائدة : ٥٥)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*<sup>24</sup>

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.<sup>25</sup>

## 2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>25</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.* hlm. 20



Setiap ilmu pastinya mempunyai objek dan bidang bahasannya, begitu pula dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar'iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian fiqh siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya mengkaji tentang fiqh siyasah. Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek-objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>26</sup>

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

- a. Hak-hak individu dalam bernegara;
- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
- c. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
- d. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
- e. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- f. Pelaksanaan demokrasi politik;
- g. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
- h. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>27</sup>

### **3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah**

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 27-28

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.* hlm 36

ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' menetapkan prinsip-prinsip kuliyyah yaitu:

- a. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau di hilangkan
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:

- 1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.

- 2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.

- c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.

- d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.<sup>28</sup>

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara menurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

- a. Adil dengan segala persyaratannya;
- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;
- c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya;
- e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan;

---

<sup>28</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 3-4

- f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh;
- g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.<sup>29</sup>

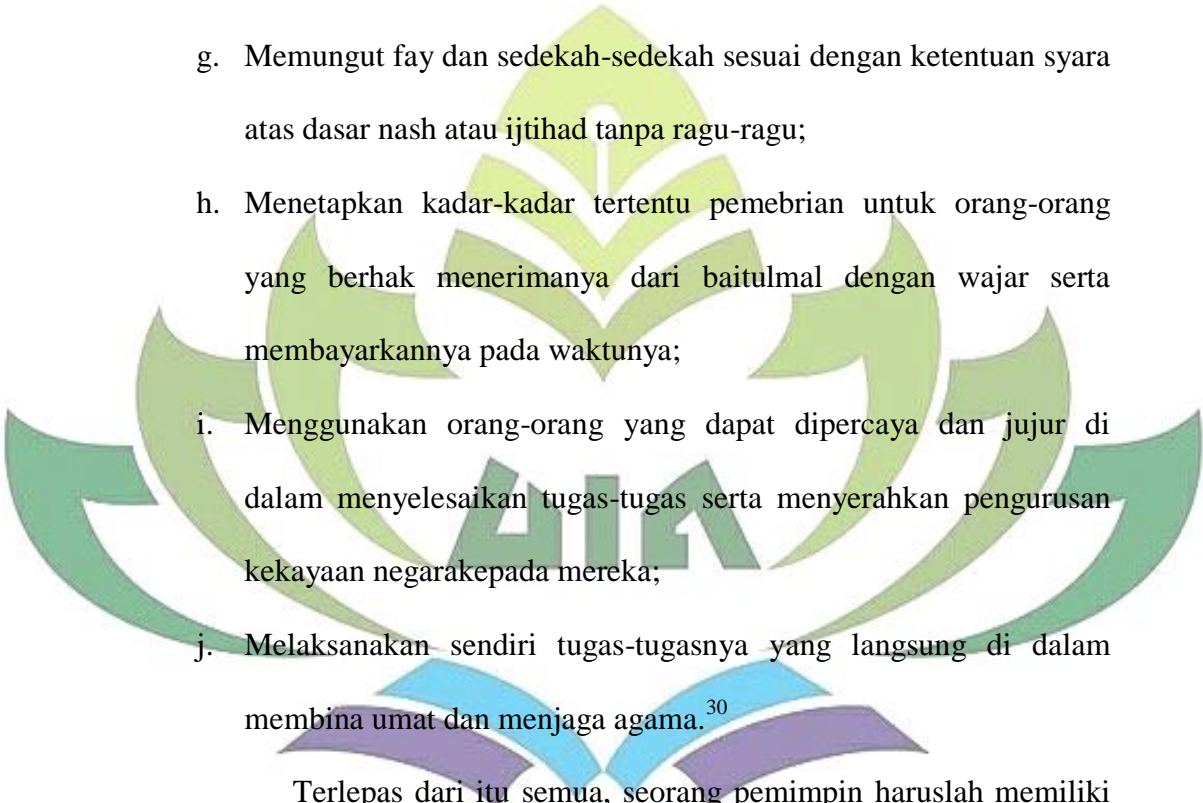
Setelah semuanya terpenuhi, barulah seseorang bisa mencalonkan ataupun dicalonkan untuk menjadi kepala Negara. Namun menjadi kepala Negara tidaklah mudah, harus memenuhi segala kewajibannya. Menurut Al-Mawardi kewajiban-kewajiban *imam* tersebut adalah:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf;
- b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum;
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan;

---

<sup>29</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan ake-4 (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm.70-71



- 
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid);
  - f. Memerangin orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi;
  - g. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu;
  - h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemebrian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya;
  - i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negarakepada mereka;
  - j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>30</sup>

Terlepas dari itu semua, seorang pemimpin haruslah memiliki sikap adil kepada semua warga, sikap adil kepada semua warga, tanpa membedakan ras, suku ataupun agama. Adil yang pemberian beras raskin kepada orang-orang miskin. Dari sikap adil itulah akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan antar muslim. Setiap warga berhak

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 61-62

menerima suatu persamaan, bukan berarti orang kaya mendapatkan perlakuan yang istimewa sedangkan orang miskin diperlakukan sewenang-wenang.<sup>31</sup>

Selain itu, pemimpin haruslah memiliki prinsip tolong menolong dan membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat yang lemah dan membela rakyat yang keadaan ekonominya lebih mampu agar terciptanya perdamaian tanpa adanya peperangan antar umat manusia, misalnya hak untuk hidup, hak atas milim pribadi dan hak mencari nafkah, serta hak mengeluarkan pendapat di muka umum.

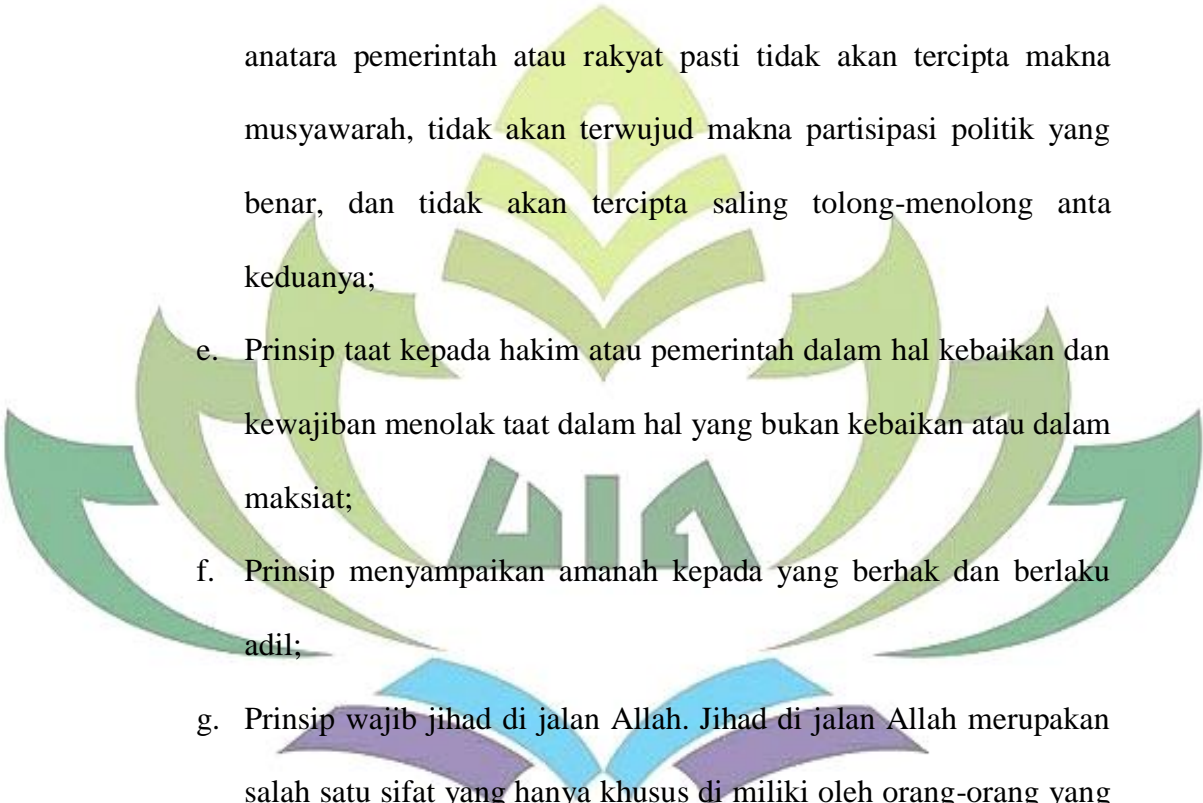
Adapun seorang pemimpin ingin memilih atau menetapkan seorang pejabat dalam melaksanakan suatu urusan, pemimpin haruslah melihat apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, jika orang tersebut bisa dipercaya barulah bisa diberi tanggungjawab untuk menjadi pejabat dalam melaksanakan suatu urusan.

Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka menerapkan beberapa prinsip konstitusional beberapa prinsip konstitusional, yaitu:

- a. Prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai syari'at Islam. Manusia di hadapan syari'at Allah adalah sama, tidak ada pengistimewaan untuk seseorang, siapapun dia;

---

<sup>31</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, hlm.6

- 
- b. Prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang shahih sebagai kewajiban ke Islam an atas para penguasa dan rakyat;
- c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban ke Islam an;
- d. Prinsip kejujuran, bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang anantara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan tercipta saling tolong-menolong anta keduanya;
- e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam maksiat;
- f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil;
- g. Prinsip wajib jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah merupakan salah satu sifat yang hanya khusus di miliki oleh orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya;
- h. Prinsip menjauhi sikap kufur. Umat-umat terdahulu terhadap nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sikap kufur, tdak

menekuni semua perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Membawa mereka kepada ketakutan dan kelaparan.<sup>32</sup>

Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu.

Sumber hukum *fiqh dusturiyah* adalah Al-qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-qur'an. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

*fiqh dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khalaf Wahab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan steratifikasi sosoal, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk

---

<sup>32</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Cetakan ke 1 (Jakarta: Amzah, 2005), Hlm. 6-

diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah* ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ (النساء : ٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>33</sup>

Ayat tersebut jelas Allah memerintahkan agar kaum muslimin taat kepada-Nya, Rasul-Nya, dan ulil amri, yang dapat diartikan dengan pemerintahan diistilahkan sebagai yang mempunyai perintah sebab mereka mempunyai kekuasaan untuk memberi perintah sebab mereka mempunyai kuasa untuk memberi perintah dan melarang kepada rakyatnya yang bersumber dari undang-undang, peraturan yang diputuskan bersama-sama untuk kemaslahatan rakyat.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 88



Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-qur'an dan dijelaskan sunnah. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh *ulil amri* yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta sejahtera.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>34</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyat yang diperintah. Perumusan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 177

konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah neagra yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undnag-undnag tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dai Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, ayturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Fiqh dusturiyah adalah kajian pertama dalam pembahasan fiqh siyasah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafazh syar'iah yang artinya "jalan yang lurus". secara terminologi, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut.

*Tasyri'* dalam pengertian syariah berarti membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiyy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa *tasyri'* merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariah.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama siyasah dusturiyah meliputi hal-hal di bawah ini:

- a. Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;

- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; dan
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian *siyasah dusturiyah*, upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.

#### **4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip. Karena hanya bersifat teknis.<sup>35</sup>

Pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok.

a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga non Muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antar negara Muslim dengan negara non Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional. Hukum perdata Internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.

---

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 14



c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*)

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

**B. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012**

Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945, hukum perundang-undangan meliputi UUD, Tap MPR, UU, Perppu, PP, Keppres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala LNPD, dan Keputusan Direktur Jenderal dan seterusnya. UUD dan Tap MPR ditetapkan oleh MPR, sedangkan undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu, (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam masa sidang berikutnya harus sudah mendapat persetujuan DPR. Jika disetujui Perppu meningkat statusnya menjadi undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR, maka perppu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke DPR dalam masa persidangan berikutnya.

Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus disetujui DPR. PP biasanya dibuat atas perintah UU atau untuk melaksanakan suatu UU. Oleh karena itu, PP tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari UU yang sudah ada lebih dahulu. Adapun Keputusan Presiden, dibentuk sendiri oleh Presiden tanpa perlu dikaitkan dengan pendelegasian materiil dari UU. Artinya, materi yang dimuat dalam Keppres dapat sepenuhnya bersifat mandiri dalam rangka

kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Keputusan Presiden dapat saja dibuat untuk melaksanakan perintah UUD, perintah GBHN, perintah undang-undang, ataupun perintah PP. Di bawah keppres, ada keputusan Menteri, Keputusan Kepala LPND, dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas menteri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Di tingkat daerah, ada pula Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum ditingkat daerah ini, seyogiannya juga mengikuti pola ditingkat pusat. Misalnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD. Akan tetapi, DPRD sendiri dapat pula berinisiatif mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif DPR pusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada pemerintah. Akan tetapi karena restrukturisasi pemerintahan daerah dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di masa yang akan datang, ketentuan mengenai pembuatan hukum seperti ini masih harus disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi itu nantinya.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm7-8

Dengan mengacu pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014), Natabaya merumuskan bahwa peraturan daerah memiliki fungsi.<sup>37</sup>

1. Pengaturan (*regelling*) sebagaimana lazimnya suatu perundang-undangan, karena peraturan daerah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan.
2. Otonomi dan tuags pembantuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Delegasi, karena peraturan daerah juga merupakan aturan delegasian dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang hirarkinya lebih tinggi dari peraturan daerah.
4. Transformasi, sesuai dengan prinsip peraturan daerah sebagai alay rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) masyarakat daerah dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya.
5. Aspirasi, yaitu menangkap aspirasi masyarakat yang bersifat khusus, baik yang bersifat sosial keagamaan maupun kebudayaan setempat, yang merupakan ciri khas daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD (provinsi atau kabupaten/kota) dengan persetujuan

---

<sup>37</sup> H.A.S. Natabaya, *Identifikasi, Tolak Ukur, dan Kesalahan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah*, (makalah, tanpa tahun), hlm.1

bersama kepala daerah, termasuk Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, yakni peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya. Contoh ‘peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan’ antara lain Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundnag-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Dalam rangka mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka perlu adanya kebijakan regulatori, yakni kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, salah satunya terdapat di dalam lingkup sistem pemerintahan Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud tujuan yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum, yakni menginginkan adanya usaha menuju kepada terciptanya suasana Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang TAPIS BERSERI (Taata Aman Patuh Iman Bersih Sehat Rapih Indah). Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi tersebut, maka perlu Pembinaan Umum dan Menyeluruh masalah keapikan Kota Bandar Lampung.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pada BAB I  
Ketentuan Umum menjelaskan bahwa:

**Pasal 1 (point g dan h)**

(g). Pedagang Kaki Lima (termasuk pedagang kaki lima musiman) adalah Perseorangan yang melakukan usaha perdagangan dan jasa dengan modal paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang dalam usahanya menggunakan lahan terbuka dan tertutup yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya dengan menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap dan memiliki identitas resmi dari organisasi Pedagang Kaki Lima yang diakui Pemerintah Daerah;

(h). Tempat Usaha adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat berdagang bagi pedagang kaki lima;

Penempatan lokasi PKL pada mulanya sebelum diberlakukan Perda maupun SK Walikota, masih belum memperhatikan perijinan penempatan. Lokasi yang dijadikan PKL untuk berdagang adalah tempat yang berpotensi ekonomi dan banyak dikunjungi banyak orang. Awalnya keberadaan PKL yang menempati lokasi umum tidak membuahkan suatu teguran, akan tetapi lambat laun setelah dirasa mengganggu ketertiban banyak dilakukan satau razia oleh Satpol PP.



Hal ini tentunya banyak menimbulkan protes dari PKL, sehingga relokasi dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.<sup>38</sup> permohonan penempatan suatu lahan untuk berusaha tersebut harus melampirkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (3), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota Bandar Lampung yang masih berlaku;
2. Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya digunakan sebagai PKL;
3. Surat persetujuan pemilik lahan, dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;
4. Sarana dan prasarana PKL yang akan digunakan;
5. Surat pernyataan yang berisi:
  - a. Tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
  - b. Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
  - c. Belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
  - d. Mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Desa, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 67

Kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kewajiban Pedagang Kaki Lima sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20, yaitu:

1. Menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan;
2. Memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi PKL;
3. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
6. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki; dan
7. Membuat dan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Selain menjalankan kewajibannya, para PKL juga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 21, yaitu:

1. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;

3. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
4. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
5. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank;

Larangan untuk para PKL pun berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22, yaitu:

1. Mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha;
2. Memperdagangkan barang terlarang;
3. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha; dan
4. Melakukan transaksi perdagangan pada prasarana, sarana dan fasilitas umum.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2012, hak, kewajiban dan larangan PKL di atur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yaitu:

Setiap pedagang kaki lima wajib:

1. Menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan sekitarnya;
2. Menyediakan tempat sampah dan atau tempat air limbah serta membuang sampah dan atau limbah tempat lain yang ditunjuk/disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;

3. Memindahkan dan membongkar sarana berdagang dari lokasi tempat usaha setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
4. Membawa kartu identitas pada saat melakukan kegiatan usahanya;
5. Membayar Identitas Berdagang dan Penggunaan Lokasi.<sup>39</sup>

Setiap pedagang kaki lima berhak:

1. Menempati tempat yang ditetapkan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
2. Mendapat pengaturan, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.<sup>40</sup>

Setiap pedagang kaki lima dilarang:

1. Memperjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
3. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
4. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
5. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang dizinkan dalam Surat Keterangan Identitas Berdagang;

---

<sup>39</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2012 tentang *Pengelolaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 10

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 11

6. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
7. Melakukan kegiatan Usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

### **C. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

#### **1. Pengertian Pengelolaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBS) kata “pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang artinya sama dengan “bangun”. Jadi, pengelolaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Menurut Dinas Pasar Kota Bandar Lampung pengelolaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing.

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka pengelolaan PKL diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.

#### **2. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima (termasuk pedagang kaki lima musiman) adalah Perseorangan yang melakukan usaha

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 13



perdagangan dan jasa dengan modal paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang dalam usahanya menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya dengan menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat untuk kepentingan umum yang diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap dan memiliki identitas resmi dan organisasi Pedagang Kaki Lima yang diakui Pemerintah Daerah.<sup>42</sup> Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang bisa diartikan sebagai jenis pekerjaan jual dan beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Asal usul istilah pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya masih simpang siur dan banyak versi. Salah satunya dari trotoar buatan Belanda yang luasnya 1,5 meter (lima kaki). Istilah PKL

---

<sup>42</sup> Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012, Pasal 1 huruf g

tersebut diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan.<sup>43</sup>

Menurut seorang tokoh Indonesia Wiliam Liddle, aturan trotoar lima kaki justru berasal dari bahasa Inggris, five foot (lima kaki).<sup>44</sup> Bapak Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan tentang pembangunan trotoar di Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggris memang pernah mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang membuat trotoar di Indonesia adalah gubernur jenderal asal Inggris, Sir Stamford Raffles.

Sementara itu, sumber lain istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna istilah kaki lima itu mempunyai arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau tepi jalan” dan “lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”

Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat di masa penjajahan (Belanda atau Inggris). Namun, pengertian yang

---

<sup>43</sup> Sutrisno Iwanto, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm 7

<sup>44</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm 3

dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko.

Ada juga yang membuat istilah lain, kaki lima diartikan “kanan kiri lintas manusia” maksudnya barangkali karena PKL berada di jalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang yang berlalu-lalang disamping kanan dan samping kiri para PKL.

Pedagang Kaki Lima (*trotoar/pedestrian*) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan peristiwa. Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL di atas, dalam hal ini dapat di jelaskan bahwa istilah PKL kaitannya dengan istilah di Perancis tentang pendestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalannya, yaitu *Trotoar*. Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki.

Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trotoar tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang Lima Kaki, sedangkan di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima atau PKL. Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berkaitan dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penerapan teknologi yang padat modal, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

### **3. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima**

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima, yaitu<sup>45</sup>:

- a. Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan depan toko, di pinggir jalan, trotoar, di atas got, di taman, bantaran kali, dan di areal parkir dan tempat-tempat ramai.
- b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan malam hari, bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan.

---

<sup>45</sup> Rachmawati Madjid, *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*, Vol. 1 No. 3 tahun 2013 hlm 64

- c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang tidak lama secara eceran.
- d. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dsb, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan.
- f. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

PKL mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri pokok sektor informal, karena dalam hal ini PKL merupakan bagian dari sektor informal. Keberadaan PKL sedikit banyak didorong karena keinginan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Meskipun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, akan tetapi pada prakteknya banyak dari mereka yang tidak berkesempatan bekerja di sektor formal lebih memilih berusaha menjadi PKL. Mereka beranggapan jika menjadi PKL merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh mengingat latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Hubungan Sektor Informal dan Sektor Formal, Sektor informal sebenarnya banyak



manfaatnya bagi kehidupan kota, hal ini dapat terlihat dari sebagian besar pekerja sektor formal tergantung pada dagangan dan jasa dari sektor informal.

Fungsi sektor ini sebagai ujung tombak pemasaran berbagai produk sektor formal tidak dapat diabaikan dalam perputaran ekonomi kota. Sektor informal ternyata juga sering dijadikan pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang telah berada dalam sektor formal seperti pemilik toko yang sore ahri menjual bakmi di halaman tokonya, toko pakaian yang menjual dagangannya di kaki lima, dll.

Alasan dilakukan cara ini, karena mudah dijalankan tanpa perlu prosedur macam-macam dan sering kali lebih efektif menarik pembeli. Meskipun demikian, PKL merupakan suatu bentuk sektor yang dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas yang dikeluarkan serta dibangun oleh mereka sendiri.

Pada mulanya mereka juga mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri. banyaknya saingan usaha tidak membuat PKL putus asa dalam mengembangkan usahanya. Mereka justru akan memunculkan inovasi baru agar usahanya semakin dilirik dan diminati para pelanggan. Dengan demikian

bahwa PKL khususnya PKL kota Bandar Lampung memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga menjadi produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri
- b. Perkataan Pedagang Kaki Lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran tikar atau pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis.
- c. Pedagang kaki lima biasanya menjual barang eceran.
- d. Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah.
- e. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok submarginal.
- f. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh PKL mengkhususkan diri dalam penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah.
- g. Omset penjualan Pedagang Kaki Lima ini umumnya tidak besar. Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.

---

<sup>46</sup> Karafir, *Pemupukan Modal Pedagang kaki Lima*, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hlm. 53

- h. Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berhasil secara ekonomis sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang sukses.
- i. Barang yang ditawarkan Pedagang Kaki Lima biasanya tidak standar dan pembagaian jenis barang yang diperdagangkan seringkali terjadi.
- j. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri yang khususnya usaha perdagangan para Pedagang kaki Lima.
- k. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat.

#### **4. Karakteristik PKL**

Salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di kota Bandar Lampung adalah dampak dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial.

Munculnya sektor informal yang mempunyai potensi yang cukup menjanjikan menyebabkan timbulnya PKL yang semakin

hari semakin bertambah banyak, akan tetapi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang tidak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian halnya yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, maraknya keberadaan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama pesatnya dengan perkembangan kota itu sendiri. sangat wajar jika pemerintah berupaya melakukan penataan terhadap menjamurnya pedagang tersebut, dan sangatlah wajar apabila saat melaksanakan penataan kadang-kadang timbul kesalahpahaman.

Masalah penataan PKL memang memunculkan dua sisi yang saling bertentangan, ibarat dua sisi mata uang, apabila saat melakukan penataan terhadap tujuan yang berbeda dan saling bertentangan antara pedagang dan pemerintah.

## **5. Dampak Keberadaan PKL**

Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL telah memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan negatif:<sup>47</sup>

### **a. Positif**

- 1) Memberikan lapangan pekerjaan;
- 2) Ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

---

<sup>47</sup> Suko Budiyo, *Peranan Sektor Informal di Kota, Kumpulan Makalah Dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informasi*. (Jakarta: Kantor Lingkungan Hidup, 1985)

- 3) ikut meningkatkan pendapatan retribusi daerah;
- 4) menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan;

b. Negatif

- 1) PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur penjalan kaki/pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut;
- 2) Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL;
- 3) Pedagang kaki lima mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal;
- 4) Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, beberapa



tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sektor lokasi PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan., sehingga keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal tersebut menurut Sethurahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang di lakukan ILO di 8 negara berkembang, karena kemampuan

menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Sisi negatif, karakteristik PKL yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum.

Tidak tertampungnya kegiatan PKL di ruang perkotaan, menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu hingga menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan modern nan megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan cenderung kumuh. Perlu adanya upaya yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima ini sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.

Hal tersebut berakibatkan penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga peruntukannya

secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya.

Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan Pedagang kaki lima tersebut.

Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

## **6. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima**

Menurut Mc Gee dan Yesun, bahwa pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

Komponen penataan ruang sektor informal. Antara lain meliputi:

#### 1. Lokasi

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari;
- b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar;
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli walaupun dilakukan dalam rangka relatif sempit;
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc Gee menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpuk-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

#### 2. Waktu berdagang

Menurut Mc Gee dan Yesung dari penelitian di kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL

menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan.

3. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut Mc Gee dan Yesung sangat di pengaruhi oleh sifat pelayanan PKL.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Didik J Rachbini; Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hlm 107



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Gambaran Umum Pasar Tugu**

###### **1. Sejarah Singkat Pasar Tugu**

Pasar Tugu berdiri pada tahun 1970, terletak di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Sawah Lama Bandar Lampung. Pada awalnya Pasar Tugu hanya terletak dipinggir jalan dengan bangunan non permanen. Penjualnya berasal dari para pedagang kecil yang hanya mendirikan lapak-lapak seperti pedagang kaki lima. Nama Pasar Tugu berasal dari adanya Tugu besar yang berada di tengah lokasi pasar. Meskipun tugu tersebut kini telah tidak ada akibat pembangunan kota namun tugu telah melekat pada pasar tersebut, sehingga nama tugu terus digunakan sampai saat ini.

Pasar Tugu telah mengalami beberapa kali perombakan. Perombakan pertama pada tahun 1973 dan mengalami perombakan lagi pada tahun 1978. Seiring perkembangan, akhirnya pada tahun 1990 dibangunlah bangunan permanen untuk para pedagang. Kemudian pada tahun 1991 setelah bangunan permanen, Pasar Tugu akhirnya kembali beroperasi di Kelurahan Sawah Lama hingga sekarang.

Adanya bangunan permanen pada Pasar Tugu tidak serta merta membuat pedagang kaki lima tergusur. Pengelola Pasar Tugu memiliki

kebijakan tersendiri untuk tetap mempertahankan pedagang kaki lima yang ada. Sehingga Pasar Tugu kini memiliki bangunan permanen dan bangunan non permanen (lapak di luar bangunan). Sebagian besar toko pada bangunan permanen diisi oleh pedagang pakaian. Sedangkan pada bangunan non permanen sebagian besar diisi oleh pedagang sayuran, buah-buahan, makanan, dan daging.

Pedagang kaki lima di Pasar Tugu memiliki jam operasi, para pedagang kaki lima di berikan jam operasi dari pagi pukul 03.00-12.00 siang. Jam operasi untuk pedagang kaki lima pun di bagi menjadi 3 kali pergantian waktu berdagang, di jam pertama pedagang kaki lima di izinkan untuk berdagang dari pukul 03.00-05.00 pagi, selanjutnya dari pukul 07.00-09.00 pagi, dan yang terakhir pada pukul 10.00-12.00 siang. Pembagian jam operasional bagi pedagang kaki lima ini bertujuan agar pedagang kaki lima tidak terlalu menumpuk dalam satu waktu jam operasi<sup>49</sup>.

## **2. Letak dan Kondisi Pasar Tugu**

Pasar Tugu merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung maupun masyarakat luar Kota Bandar Lampung. Adanya sebuah sekolah maka membuka peluang juga kepada pedagang untuk mencari nafkah. Pedagang pun mulai berdagang di sekitaran sekolah tersebut. Berjalannya waktu semakin banyak pula pedagang yang berjualan di

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Aidil, pedagang baju, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung

lokasi tersebut. Melihat fenomena tersebut maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi pasar tradisional dengan nama Pasar Tugu. Pasar Tugu terletak di Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

Kondisi bangunan Pasar Tugu sendiri dari pertama kali di bangun belum pernah mendapat perawatan atau perbaikan dari pihak pemerintah sehingga kondisi bangunan pasar Tugu ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Bangunan di Pasar Tugu sudah rapuh dan dapat membahayakan para pengunjung maupun pedagang. Bangunan permanen di Pasar Tugu khususnya bangunan di yang di dalam di lantai 2 banyak atap yang sudah mulai runtuh, bahkan kantor UPT Pasar Tugu pun sudah tidak layak digunakan, kurang nya kebersihan.<sup>50</sup>

Tahun 2014 pemerintah pernah membuat sebuah kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Tugu dengan harapan terciptanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung serta terciptanya bangunan yang indah, tertib dan aman. Dalam kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Tugu yang ingin dicapai adalah tercapainya bangunan setinggi delapan lantai. Spesifikasi diantaranya tiga lantai terbawah merupakan basement, tiga lantai diatasnya untuk berjualan serta dua lantai

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Hana, pedagang Minuman, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

berikutnya akan dibangun hotel. Kebijakan ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak pengembang. Bangunan tersebut akan diserahkan kepada pihak pengembang untuk membangun dengan jangka waktu dua tahun. Selama waktu yang diberikan diharapkan perubahan yang ingin dicapai tersebut dapat terealisasi. Meskipun pada kenyataannya sampai saat ini pembanguna di Pasar Tugu masih belum terealisasi dengan baik bahkan keadaan bangunan di Pasar Tugu sangat tidak layak di gunakan lagi.

### **3. Data Unit Pasar Tugu**

Data unit yang diperoleh dari penelitian langsung di Pasar Tugu kota Bandar Lampung, yaitu:

#### **a. Pengelola pasar**

Pengelola pasar di pasar Tugu kota Bandar Lampung terdiri dari 21 orang linit pasar, 10 orang petugas kebersihan, petugas keamanan 16 orang.

#### **b. Pedagang yang memiliki kios**

Pedagang yang memiliki kios di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung terdiri dari 60 buah Toko Swasta, Kios Milik Swasta 200 buah.

#### **c. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima di pasar Tugu Kota Bandar Lampung dari data yang di dapat ada 254 pedagang PKL, dan jumlah ini

bersifat tidak tetap karena perubahan jumlah tergantung musim dan cuaca.

d. Peralatan kebersihan

Peralatan kebersihan yang di miliki Dinas Pasar Tugu kota Bandar Lampung yaitu, 1 buah Bak container sampah, 4 buah gerobak sampah, dan 1 buah truk sampah.

**B. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tugu Bandar Lampung**

Kewenangan pengelolaan pasar secara struktur dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung dan pengelolaan pasar terbagi menjadi 2 wilayah:

1. Pasar Wilayah Tanjung Karang Barat
2. Pasar Wilayah Teluk Betung

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan program kegiatan dalam lingkup wilayah pasar yang menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Pasar antara lain:

1. Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar
2. Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar
3. Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar
4. Pengelolaan pendapatan retribusi

Program kerja dan kegiatan yang menjadi unggulan/skala prioritas Dinas Pengelolaan Pasar.

1. Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL)
2. Kebersihan dan keindahan pasar (Adipura)



### 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi

Pelaksanaan tugas Dinas Pasar pun memiliki fungsi-fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi lalu lintas di jalan Hayam Wuruk, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, tepatnya di Pasar Tugu , tak pernah lekang dari kepadatan. Motor dan mobil, bahkan becak saling berebut untuk bisa mendahului jalannya. Tak sedikit pengendara yang parkir di pinggir jalan hingga memakan badan jalan dan menambah semerawut lalu lintas.

Pemandangan tersebut melekat dengan Pasar Tugu. Pedagang banyak yang tumpah ruah hingga ke pinggir jalan. Mereka memilih lokasi yang dianggap strategis ketimbang menempati kios yang ada di dalam pasar.

Di lantai dua pasar tersebut terlihat petugas Satpol PP di ruangan petugas pasar, hanya ada dua pedagang yng berjualan di lantai dua. Sementara di lantai tiga, yang sebelumnya digunakan sebagai bioskop, terlihat kumuh dan banyak kotoraan kelelawar, tidak terawat hanya terlihat

beberapa keranjang sayuran yang sudah rusak, di atas plafon terlihat ratusan hewn malam bergelantungan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Pasar Tugu Bandar Lampung per Oktober 2018, jumlah PKL yang ada di Pasar Tugu 297 pedagang. Data ini terus berkembang oleh karena kondisi sosial, ekonomi kurang menentu. Setiap tahun nya bisa dipastikan penambahan pedagang bisa mencapai 10-15 pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar Lampung.<sup>51</sup>

Dalam pengelolaan PKL di Pasar Tugu Bandar Lampung pun setiap tahun nya terus dikembangkan agar dapat memberi kenyamanan untuk para PKL dan juga masyarakat di sekitar Pasar Tugu khususnya.

Setiap hari nya Dinas Pengelolaan Pasar Tugu melakukan pengontrolan, khususnya pada jam-jam oprasional yang diberikan kepada PKL untuk memastikan para pedagang melaksanakan ketertiban atau mematuhi kebijakan yang diberikan Dinas Pasar kepada para pedagang.<sup>52</sup>

Menurut ibu Rumayah (45 tahun,pedagang baju)<sup>53</sup>, ibu Sahatun (45 tahun, pedagang soto),<sup>54</sup> mereka mengatakan dalam masalah kebersihan mereka hanya mengandalkan petugas dari Dinas Pasar untuk membersihkan pasar. Mereka mengaku bahwa mereka sudah membayar

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Andrea Marina, Wakil Ketua UPT Pasar Tugu, 19 Oktober 2018, di kantor UPT Pasar Tugu Kota Bandar Lampung

<sup>52</sup> Wawancara dengan Khaidir, Pedagang peralatan rumah tangga, 19 Oktober 2018, di Pasar tugu Kota Bandar lampung

<sup>53</sup> Wawancara dengan Rumayah, Pedagang Baju, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>54</sup> Wawancara dengan Sahatun, Pedagang Soto, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

uang kebersihan setiap hari nya sehingga mereka menyerahkan seluruhnya kepada petugas kebersihan. Untuk masalah air bersih pun mereka mengaku dalam seminggu bisa dipastikan bahwa ada hari dimana mereka tidak bisa mendapatkan air bersih dengan baik.<sup>55</sup> Bahkan menurut pengakuan dari bapak Asep (28 tahun) pedagang pakaian, dan ibu Susi (34 tahun) pedagang buah, mengatakan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan pengelolaan yang baik dari pihak Dinas Pasar.<sup>56</sup> Tidak terjamin nya keamanan dari pihak pungli atau preman pasar membuat mereka harus keluar lebih banyak uang lagi dari yang sudah ditentukan oleh pihak pasar sebelumnya. Pihak keamanan yang disediakan oleh Dinas Pasar hanya ada satu SatpolPP untuk menjaga keamanan di pasar.

Saat ditanyai mengapa mereka (PKL) tidak pindah ke tempat yang sudah di sediakan oleh Dinas Pasar, mereka mengatakan tempat yang disediakan tidak layak, gedung yang sudah banyak retak, atap yang bocor, dan mereka mengatakan bahwa omset mereka akan jauh lebih dikit jika mereka memilih untuk pindah ke dalam gedung yang sudah disediakan<sup>57</sup>. Selain kondisi yang tidak terawat hanya terlihat beberapa keranjang sayuran yang sudah rusak di dalam bangunan, di atas plafon juga terlihat ratusan kelelawar bergelantungan.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Yusuf, Pedagang baju, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung

<sup>56</sup> Wawancara dengan Asep dan Susi, Pedagang pakaian dan Pedagang Buah, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>57</sup> Wawancara dengan Rais Yusuf, Pedagang buah-buahan, 19 Oktober 2018 di Pasar Tugu Bandar Lampung

Ibu Tini (25 tahun) pedagang es, mengatakan bahwa memang benar dalam seminggu ada penertiban pedagang, tapi bukan penertiban besar yang mengharuskan mereka untuk berpindah lapak atau sebagainya, penertiban yang dilakukan hanya sekedar kunjungan dari salah satu pihak Dinas Pasar, untuk mengontrol kebersihan dan jumlah pedagang yang ada di lapangan bertambah atau berkurang. Tapi komunikasi atau upaya Dinas Pasar untuk mendengar keluhan para pedagang kurang dan bahkan tidak terjalin dengan baik.<sup>58</sup>

Lihin (46 Tahun) pedagang es menyayangkan kondisi pasar tugu yang kumuh dan tidak terawat. Para pedagang juga tidak tertib karena tidak adanya ketegasan dari petugas pasar. Lihin juga menyayangkan keadaan pasar yang menurutnya sangat tidak terawat.<sup>59</sup>

Saat malam hari, lantai dua pasar tugu dijadikan tempat tidur bagi para anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka tidur bersama di beberapa ruangan di lantai dua, kurang lebih sepuluh tahun lantai dua pasar tugu tidak difungsikan lagi.<sup>60</sup>

Bagian bawah ke arah belakang pasar, terlihat kondisi lantai paling bawah khusus lapak ikan dan daging, berseberangan dengan lapak sayuran, kondisinya kumuh, tidak terawat dan banyak tikus. Sering kekurangan air bersih, kondisi pasar yang becek, sampah berserakan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Tini, Pedagang Es, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>59</sup> Wawancara dengan Lihin, Pedagang Es, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>60</sup> Wawancara dengan Asli Jaya, Aparatur Pengelola Pasar Tugu, 19 Oktober 2018 di Pasar Tugu Bandar Lampung

sebagai alasan para pedagang kurang mematuhi tata tertiba yang di berikan pengelola, karena mereka merasa tidak di berikan fasilitas yang selayaknya sehingga para pedagang merasa tidak memiliki kewajiban lebih untuk menjaga dan membantu kebersihan dari pasar tugu. <sup>61</sup>

Menurut Eko Selamat (37 Tahun) pedagang baju anak, eko berjualan di lantai dua mengeluhkan kebersihan di lantai dua, sering dijadikan tempat buang air kecil oleh beberapa orang membuat lantai dua menjadi bau dan semakin terlihat kumuh. <sup>62</sup> Area parkir yang luas pun dikeluhkan oleh pedagang kaki lima yang berjualan, halaman parkir yang luas justru tidak difungsikan dengan baik, sehingga parkir terlihat berantakan, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir bahkan di area trotoar jalan, menjadikan jalanan macet dan di anggap menjadi masalah bagi pedagang lain yang berjualan di dalam area pasar, sehingga kurang nya pembeli yang mau masuk ke area pasar karena sudah ada pedagang lain yang di luar area pasar. <sup>63</sup>

Menurut 24 pedagang yang bersedia menjadi nara sumber, 19 pedagang mengatakan keluhan yang sama yaitu air bersih dan masalah keamanan di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. 5 dari pedagang yang menjadi nara sumber mengatakan bahwa mereka merasa cukup puas

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Wak Ilen, Pedagang buah-buahan, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>62</sup> Wawancara dengan Eko Selamat, Pedagang Baju, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>63</sup> Wawancara dengan Naim, Pedagang bakso, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung



dengan fasilitas dan perhatian yang di berikan oleh UPT Dinas Pasar Tugu Kota Bandar Lampung.

Tidak jauh berbeda dengan pedagang di Pasar Tugu, menurut keterangan dari ibu Andrea Marina selaku wakil ketua UPT Pasar Tugu membenarkan bahwa permasalahan-permasalahan yang masih terus menjadi pokok utama masalah di Pasar Tugu adalah kebersihan, air bersih dan fasilitas yang layak bagi para pedagang. Menurut Andrea pihak Dinas Pasar Tugu sudah sering kali mengajukan keluhan-keluhan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait masalah kurang nya sarana air bersih, tempat yang layak dan keamanan yang baik di lapangan. Hanya saja kurang nya respon yang baik dari Pemerintah Kota membuat pihak Dinas pasar di Pasar Tugu harus mencari solusi sendiri, seperti masalah keamanan, mereka bukan membiarkan begitu saja terjadi nya pungli dari pihak preman pasar, hanya itu menjadi salah satu solusi yang baik untuk sekarang, seperti menjalin kerjasama dan saling menguntungkan, tidak akan terjadi saling mengganggu yang dilakukan pihak preman pasar kepada para pedagang dan dijamin nya keamanan sekitar membuat Dinas Pasar Di Pasar Tugu membiarkan para preman meminta uang kemanan kepada para pedagang, bahkan pihak Dinas Pasar pun ikut memberikan uang keamanan kepada preman sekitar.

Peraturan daerah No.02 Tahun 2012 Pasal 8 pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan retribusi, atau mencabut izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima jika para pedagang

tidak melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. pemberian sanksi juga dijelaskan dalam Pasal 20, adanya sanksi pidana yang akan diberikan kepada setiap pelanggar peraturan daerah, sanksi pidana berupa kurungan penjara 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun pada kenyataan di lapangan yang penulis temukan tidak ada nya sanksi yang dilakukan pihak UPT ataupun pihak pemerintah daerah kota Bandar Lampung. Menurut bapak Tajudin (32 tahun, Satpol PP) penertiban yang dilakukan selama ini hanyalah tindakan kecil atau peringatan kepada para pedagang tanpa memberikan penertiban yang besar agar pedagang jera.<sup>64</sup>

Pengelolaan pasar Tugu kota Bandar Lampung diakui oleh pihak UPT Pasar Tugu tidak berjalan dengan baik, tidak ada tindakan tegas dari pihak UPT dan pemerintah kota bandar Lampung menjadikan para pedagang masih melakukan banyak pelanggaran.<sup>65</sup>

Menurut Dasmina (32 Tahun) Aparatur Pengelola Pasar Tugu, jika ada tindakan tegas mungkin pedagang dan keadaan di pasar tugu tidak berantakan seperti sekarang, Dasmina juga mengatakan bahwa pemerintah harus lebih tegas, tidak seperti sekarang yang menjadikan peraturan hanya sekedar peraturan, tidak adanya dukungan dai pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat para aparatur pengelola Pasar Tugu merasa

---

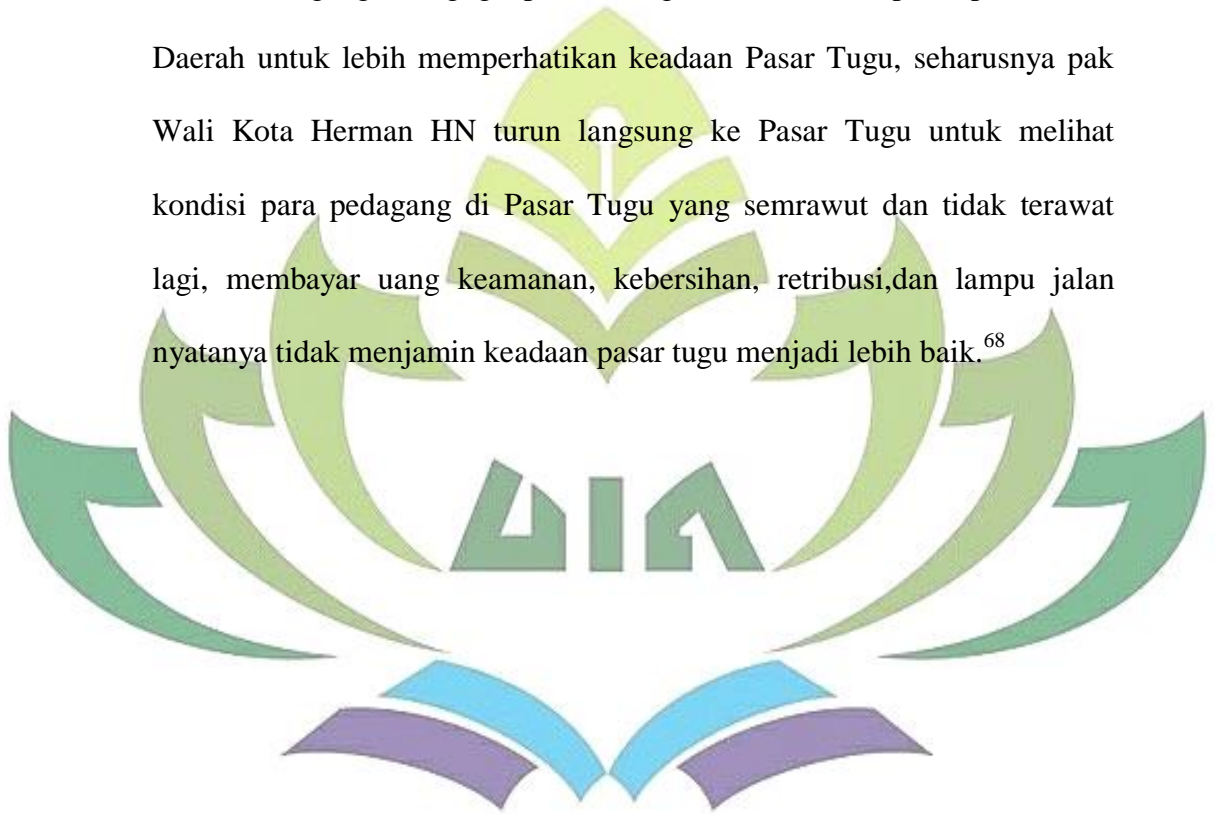
<sup>64</sup>Wawancara dengan Tajudin, Aparatur Pengelola Pasar Tugu, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>65</sup>Wawancara dengan Murhakim, Aparatur Pengelola UPT Pasar Tugu, 19 Oktober 2018 di kantor UPT Pasar Tugu Kota Bandar Lampung

kurang memiliki kekuatan untuk menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pasar tugu.<sup>66</sup>

Keadaan pasar tugu yang memprihatinkan berdampak dengan jumlah pembeli setiap hari nya. Kebersihan dan kenyamanan dinilai wajib di perhatikan untuk menarik pembeli di pasar tugu sehingga kegiatan ekonomi di pasar tugu kembali normal seperti dulu lagi.<sup>67</sup>

Pedagang mengungkapkan keinginan mereka kepada pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan keadaan Pasar Tugu, seharusnya pak Wali Kota Herman HN turun langsung ke Pasar Tugu untuk melihat kondisi para pedagang di Pasar Tugu yang semrawut dan tidak terawat lagi, membayar uang keamanan, kebersihan, retribusi, dan lampu jalan nyatanya tidak menjamin keadaan pasar tugu menjadi lebih baik.<sup>68</sup>



---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Dasmina, Aparatur Pengelola Pasar Tugu, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>67</sup> Wawancara dengan Epi, Pedagang es, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

<sup>68</sup> Wawancara dengan Agus Wardian, Pedagang Baju, 19 Oktober 2018, di Pasar Tugu Bandar Lampung

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu di Bandar Lampung Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2010**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012, Pedagang kaki lima wajib dalam menjaga kebersihan, keindahan ketentraman dan ketertiban di dalam lingkungan sekitar. Menyediakan tempat sampah dan tempat air limbah, memindahkan dan membongkar sarana berdagang mereka dari lokasi usaha jika sudah selesai, membayar identitas berdagang dan penggunaan lokasi.

Meskipun pada kenyataan yang ada di lapangan, masih banyak pedagang kaki lima, pihak pengelola pasar UPT Pasar Tugu dan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tidak menjalankan kewajiban yang sudah di sebutkan sebelumnya. Masih banyak pedagang yang tidak menyediakan tempat sampah ataupun tempat air limbah dagangan mereka, sampah yang berserakan dan air limbah dagangan yang di biarkan mengalir sehingga menambah ketidaknyamanan di pasar Tugu.

Pedagang kaki lima pun memiliki hak sesuai dengan Undang-undang yang di atur, menempati tempat berdagang mereka di tempat yang sudah di tetapkan, dan mendapat pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. berbeda dengan hasil penelitian di lapangan mengenai kewajiban PKL yang kurang dijalankan dengan baik, hak PKL justru di dapat oleh para pedagang, walaupun dalam point pengawasan dari pemerintah tidak

sepenuhnya di dapat oleh para pedagang. Perhatian yang kurang di dapat dari pemerintah dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik menjadi salah satu faktor tidak tertibnya para pedagang kaki lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung.

Tindakan penertiban yang di berlakukan dalam Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 yang dijelaskan Pasal 20 tidak dilaksanakan oleh pihak pengelola pasar Tugu dan Pemerintah Daerah kota Bandar Lampung. Pasal 20 menjelaskan sanksi yang diberlakukan untuk para pedagang yang melanggar ketentuan dalam Perda, ketentuan pidana sudah sangat tegas di jelaskan dalam Pasal tersebut, hanya saja dalam lapangan nya tidak sekalipun pihak pengelola atau pemerintah daerah kota Bandar Lampung memberikan sanksi kepada para pedagang yang melanggar.

Dalam penelitian yang ada di lapangan langsung, tidak semua PKL menerima hak dan menjalankan kewajiban dan larangan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan di atas. Masih kurang nya kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung dalam menjaga kebersihan untuk kebaikan bersama, bahkan masih ada beberapa pedagang yang membuka lokasi dagang di tempat yang bukan disediakan oleh pihak UPT Pasar Tugu. Sehingga kemacetan pun masih menjadi masalah besar di sekitar Pasar Tugu.

#### **B. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda No.02 tahun 2012 Menurut Fiqh Siyasah**

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan



hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-qur'an dan dijelaskan sunnah. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh *ulil amri* yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta sejahtera.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.

Dari point di atas, dengan jelas dalam kajian siyasah dusturiyah pemerintah sangat bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem antara hubungan bermasyarakat. Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai kebijakan pengelolaan pasar diharapkan dapat memberikan peraturan yang baik pada para PKL tanpa merugikan pihak lain.

Kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah juga di atur dalam kajian fiqh siyasah, namun pada kenyataan nya masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban nya, tidak mematuhi perintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Tata tertib yang di atur oleh Undang-Undang Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 tentang PKL tidak di jalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi nya ketertiban, kenyamanan, kebersihan, pengurangan kemacetan lalu lintas yang di harapkan akan terwujud dengan adanya Undang-undang yang sudah di berlakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

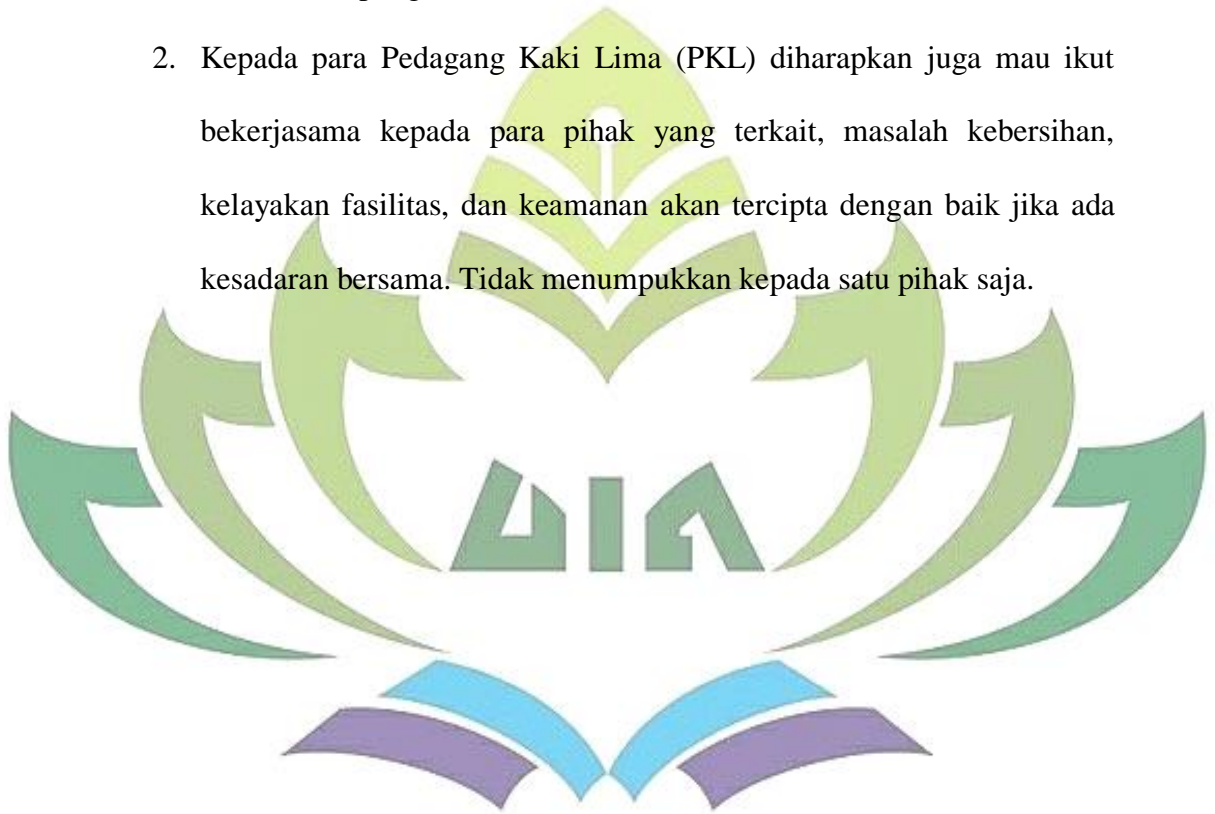
Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang dipaparkan di atas. Penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam Perda No. 02 Tahun 2012 Pasal 10, sudah sangat jelas bahwa PKL memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, dan Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi pidana untuk semua pelanggaran yang dilakukan, hanya saja dalam lapangannya masih banyak PKL bahkan dari pihak pemerintah nya tidak menjalankan point-point dalam undang-undang dengan baik, dan ketidak tegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga Pasar Tugu masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib.
2. Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam undang-undang No. 02 Tahun 2012, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

#### **B. Saran**

Sebagai akhir dari tulisan ini, izinkan penulis memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan bisa lebih merespon setiap keluhan dari masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan untuk bisa lebih sering terjun kelapangan agar bisa melihat langsung setiap kekurangan yang terjadi di lapangan. Mampu memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan agar tercipta nya kebersihan, kenyamanan di Pasar Tugu Bandar Lampung.
2. Kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan juga mau ikut bekerjasama kepada para pihak yang terkait, masalah kebersihan, kelayakan fasilitas, dan keamanan akan tercipta dengan baik jika ada kesadaran bersama. Tidak menumpukkan kepada satu pihak saja.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab, Buku, Kamus

Abdul Aziz Dahlan, et. Al (ed). *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung PT. Citra Aditya Bhakti 2004)

Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006),

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, cetakan keempat)

Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983)

A.M Saefudidin dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Amir Syarifudin, *Ushl Fiqh*, (Jakarta, PT. Logos Wavana Ilmu, 1997)

AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2009)



Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

Didi kusrini, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),

Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2001)

Jurnal Al- 'Adalah No. 10 Tahun 2006

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cetakan ketujuh, CV Mandar Maju, 1996)

Martiman Prodjhamidjojo, *Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*, Ghalia Indonesia, 1987

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontektualisasi, dontrin politik Islam*, (Jakarta, Pernada Media Group, 2014)

Mulyana, W Kusumah, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (Jakarta: PT Elex Media, 2000)

Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003)

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta)

Susiadi, *metodologi penelitian*, (Bandar Lampung, Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015)

T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES)

Wagianto, *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, (Calina Media dan Arti Bumi Intaran, 2017)

Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung IAIN RIL,, 2015)

#### **B. Kitab, Buku, Kamus**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Pasal 56

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

#### **C. Internet**

Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal\\_163\\_Indische\\_Staatsregeling](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling),  
pada tanggal 25 September 2018 pukul 19.52.

